

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi literatur yang berisi tentang hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sejenis dan memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dilakukan oleh peneliti lain. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penulis memuat beberapa jurnal yang dijadikan referensi dimana jurnal tersebut berkaitan dengan penelitian penulis.

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Eko ari wibowo, Muradi, Arifin sudirman (2018) ; Penerapan Strategi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak Di Kota Magelang, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Peter Schroder mengenai strategi politik. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh KPU Magelang yaitu strategi *ofensif* dan *defensif* berhasil diterapkan melalui program-program KPU yang telah ada<sup>1</sup>.

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul Alfrid Sentosa, Tutik Haryani (2018); Strategi Politik Pemenangan Pasangan Fairid Naparin Dan Umi Mastikah Dalam Pemilukada Kota Palangkaraya 2018, dimana dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup> Eko ari wibowo, Muradi, Arifin sudirman (2018) ; Penerapan Startegi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak Di Kota Magelang

menggunakan teori Prihatmoko & Moessafa mengenai strategi politik melalui komunikasi politik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi politik yang digunakan melalui komunikasi sangat efektif pada pemilu di Kota Palangkaraya<sup>2</sup>.

Penelitian terdahulu ketiga berjudul Halimur Rosyid (2019) ;Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, dimana penelitian ini menggunakan teori Fritzs Plasser dan Gunda Plasser mengenai marketing politik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik yang digunakan pada saat pemilu 2014 berhasil untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih pada saat pemilu 2014 selain itu juga peneliti mampu mengungkapkan tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh partai gerindra pada saat pemilu tahun 2014<sup>3</sup>.

Penelitian terdahulu keempat berjudul Fani alfian, Ubaidulla (2019); Strategi Politik Aminullah Usman dan Zainal Arifin pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017, dimana penelitian ini menggunakan teori marketing politik dengan cara menciptakan program-program baru yang spektakuler. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik yang digunakan Aminullah Usman

---

<sup>2</sup> Alfrid Sentosa, Tutik Haryani (2018); Strategi Politik Pemenangan Pasangan Fairid Naparin Dan Umi Mastikah Dalam Pemilukada Kota Palangka Raya 2018. Vol 2 No1

<sup>3</sup> Halimur Rosyid (2019); Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. Vol 11 Nomor 1.

dan Zainal Arifin berhasil memenangkan mereka pada pilkada tahun 2017 di Banda Aceh<sup>4</sup>.

Penelitian terdahulu kelima berjudul Surahmadi (2016); Strategi pemenangan politik pasangan Idza-Narjo dalam pemilukada kabupaten Brebes Periode 2012-2017, dimana pada penelitian ini menggunakan teori Peter Schorder tentang strategi politik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh tim sukses pada pemilukada Brebes sangat efektif merebut suara masyarakat Brebes<sup>5</sup>.

Penelitian terdahulu terakhir berjudul Suaib Nafir (2016); Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Majene, dimana pada penelitian ini menggunakan teori Peter Schorder tentang strategi politik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *ofensif* dan *defensif* yang digunakan pasangan Fahmi Massiara-Lukman berhasil diterapkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Majene<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Fani alfian, Ubaidulla (2019); Strategi politik Aminullah Usman dan Zainal Arifin pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017. Vol 4 Nomor 4.

<sup>5</sup> Surahmadi (2016); Strategi pemenangan politik pasangan Idza-Narjo dalam pemilukada kabupaten Brebes Periode 2012-2017. Vol 7 Nomor 2

<sup>6</sup> Suaib Nafir (2016); Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Majene. Vol 2 Nomor 2

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Pengertian Strategi Politik

Strategi politik seringkali digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan politik, terutama pada saat pemilihan umum<sup>7</sup>. Strategi politik yang dilakukan berkaitan dengan strategi kampanye dimana memiliki tujuan untuk memperoleh hasil suara yang maksimal di pemilu agar memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat.

Menurut Michael Allison dan Jude Kaye, strategi adalah proses sistematis yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi<sup>8</sup>.

Strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya untuk mencapai tujuan dalam memenangkan kontes di bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

---

<sup>7</sup> Schröder, Peter. 2004. Strategi Politik, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung

<sup>8</sup> Michael Allison, dan Jude Kaye, Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia),

Menurut Baihaqi, strategi adalah suatu alat dan cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Strategi politik kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan<sup>9</sup>.

Berdasarkan pendapat diatas, strategi politik diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu. Dengan strategi politik ilmiah yang baik dan tepat partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan. Maka dari itu setiap partai politik yang berkompetisi pada pemilihan umum harus menyiapkan strategi politik dengan sebaik mungkin.

Menurut Peter Schorder, strategi politik adalah startegi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu aturan baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi<sup>10</sup>.

Peter Schorder berpendapat bahwa strategi politik adalah sebuah cara untuk mendapatkan kekuasaan agar dapat mereliasasikan cita-cita politik. Hal ini juga seringkali menjadi permasalahan untuk rakyat, karena apabila strategi yang digunakan kurang tepat akan menghasilkan produk atau peraturan yang kurang baik . Maka dari itu membuat strategi politik yang baik sebelum merumuskan suatu peraturan adalah hal yang sangat penting.

## 2.2.2 Jenis Strategi Politik

### 1. Strategi *Ofensif*

Strategi *ofensif* merupakan strategi yang digunakan dalam strategi politik yang bertujuan untuk mencari pemilih baru dan memperluas mangsa pasar dalam

---

<sup>9</sup> Ibid. Hal 19

<sup>10</sup> Schröder, Peter. 2004. Strategi Politik, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung

pemilihan umum. Strategi *ofensif* digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah pemilihnya, strategi yang digunakan yaitu dengan memberikan inovasi program baru yang akan memberikan keuntungan terhadap pemilih<sup>11</sup>.

a. Strategi perluasan pasar

Strategi perluasan pasar digunakan dalam kampanye pemilu dan penerapan kebijakan. Dalam perluasan pasar perlu dilakukan pembaruan produk, produk yang lama belum berhasil dijalankan dengan baik, maka itulah yang harus dilakukan pembaruan agar menghasilkan produk baru yang lebih baik, produk baru yang dimaksud disini adalah kebijakan baru yang dihasilkan.

Bagi partai sendiri, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan:

1. Platform partai harus memiliki ciri khas sendiri
2. Menciptakan profil baru yang dapat diterima oleh masyarakat
3. Kader partai harus menampilkan keselarasan dengan program yang dicetuskan

Dalam melaksanakan strategi politik, perluasan pasar sangatlah penting dilakukan. Dalam strategi perluasan pasar hal yang terpenting ialah bagaimana target yang dituju mampu mengerti dengan produk yang ditawarkan dan mengetahui

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal 45

keuntungan-keuntungannya. Maka dari itu dalam menjalankan strategi menembus pasar, partai politik harus paham mengenai keadaan pasar itu seperti apa.

b. Strategi menembus pasar

Strategi menembus pasar merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap keadaan pemilih di daerah tersebut. Setelah mengetahui keadaan pemilih, maka dilihat juga program diberikan lawan yang sebelumnya telah berhasil dalam melakukan strategi tersebut.

2. Strategi *defensif*

Strategi *defensif* dilakukan apabila partai politik ingin mempertahankan mayoritasnya atau pemilih yang ingin dipertahankan<sup>12</sup>.

a. Strategi mempertahankan pasar

Strategi ini merupakan cara partai politik dalam menjaga mayoritas pemilihnya. Partai politik mempertahankan pendukung dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pemilih musiman, agar tetap menjadi pemilih tetap pada partai politik tersebut. Partai politik dalam menjaga pemilihnya, dengan cara membuat produk berbeda dari lawannya.

---

<sup>12</sup> Schröder, Peter. 2004. Strategi Politik, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung

## b. Strategi melepas atau menyerahkan pasar

Strategi dalam melepas pasar diartikan sebagai tindakan dari partai politik yang ingin menyerah dengan keadaan. Dalam arti lain partai politik mengalami keadaan ingin berkoalisi dengan partai lain, selain itu pada pemilu yang melakukan pemungutan suara putaran kedua, biasanya hal ini diikuti oleh kandidat-kandidat yang kuat dalam pemilu putaran pertama, penyerahan pasar untuk sementara diberikan kepada pihak ketiga sering terjadi.

### 2.2.3 Pengertian Partai Politik

Partai Politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir. Kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang mempunyai ideologi tertentu, dan mempunyai tujuan yang sama<sup>13</sup>.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa partai merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *part*, yang berarti bagian. Partai merupakan suatu organisasi yang menggabungkan orang-orang yang memiliki kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, dan kepentingan<sup>14</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti kata yang luas dan sempit, partai adalah organisasi yang mengelompokkan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Partai politik merupakan organisasi yang terorganisir dimana para kadernya memiliki tujuan yang sama.

---

<sup>13</sup> Labolo Muhadam, Ilhan Teguh. 2015. *Partai Politik dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada

<sup>14</sup> Ibid. Hal 122



Pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok orang dengan secara sukarela atas dasar kesamaan cita-cita dalam memperjuangkan kepentingan politik, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik memiliki beberapa unsur yaitu (i) Organisasi politik resmi, (2) Aktivistik politik, (3) Aktivitas politik, (4) Tujuan politik<sup>15</sup>.

#### 2.2.4 Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya. Secara garis besar partai politik memiliki dua fungsi yaitu secara internal dan eksternal. Dalam fungsi internal partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian organisasi tersebut. Sedangkan fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara<sup>16</sup>.

Secara lebih rinci Miriam Budihardjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah:

##### 1. Sarana komunikasi politik

Secara harfiah komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan politik dari pemerintah kepada rakyat

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>16</sup> Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

dan begitu pula sebaliknya<sup>17</sup>. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat terkait mengenai regulasi, keputusan-keputusan, dan kebijaksanaan, tetapi juga aspirasi yang mereka tampung dari masyarakat. Hal ini membuat partai politik menjadi suatu komponen yang penting dalam sistem politik

## 2. Sarana sosialisasi politik

Sosialisasi berarti upaya memperkenalkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat<sup>18</sup>.

Dalam sosialisasi politik terdapat dua metode penyampaian pesan yaitu:

### a. Melalui pendidikan politik

Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat lain mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta symbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Pendidikan politik diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing secara sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan.

### b. Melalui Indoktrinasi politik

Indoktrinasi politik ialah proses yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa untuk menanamkan nilai, moral, norma, dan symbol yang dianggap baik oleh pihak

---

<sup>17</sup> Ibid, Hal 163

<sup>18</sup> Ibid, Hal 165

penguasa tersebut kepada masyarakat. Biasanya indoktrinasi politik dilakukan oleh sistem politik totaliter.

### 3. Rekrutmen politik

Sistem rekrutmen merupakan hal yang penting bagi partai politik, karena ini lah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan kader partai yang baik agar mampu menjadi wakil untuk partai dalam pemilihan umum. Dengan adanya proses rekrutmen maka partai politik dapat menyesuaikan calon anggota partai dengan karakteristik partai tersebut.

Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu: a. Sistem Rekrutmen Terbuka, dengan melakukan sistem rekrutmen terbuka artinya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka orang tersebut memiliki kesempatan untuk menjadi kader partai dan mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintah. b. Sistem Rekrutmen Tertutup, sistem ini hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu sebagai kader politik, seperti kawan, keluarga, atau orang-orang yang mempunyai persamaan seperti ras, agama, dan etnis.

### 4. Pengatur konflik

Partai politik memiliki fungsi sebagai pengendali konflik, partai politik dianggap mampu menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang dialogis, yaitu menerima dan mengumpulkan berbagai aspirasi dan kepentingan pelaku konflik kemudian membahas dan melakukan musyawarah di lembaga Dewan Perwakilan

Rakyat. Hasil dari musyawarah tersebut merupakan solusi dari permasalahan tersebut.

#### 2.2.5 Klasifikasi Partai Politik

Partai politik memiliki berbagai jenis yang memiliki perbedaan basis sosiologinya. Menurut Ichlasul Amal, terdapat lima klasifikasi partai politik dibedakan berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi partai tersebut.<sup>19</sup>, yaitu:

##### 1. Partai Proto

Partai proto adalah jenis partai yang pertama kali muncul, bisa dikatakan bahwa jenis partai ini merupakan bentuk awal kemunculan partai politik. Partai proto merupakan partai yang memiliki ciri-ciri yaitu memberikan perbedaan antara kelompok anggota dengan non-anggota.

##### 2. Partai Kader

Partai kader merupakan jenis partai yang mementingkan ketaatan anggota terhadap organisasi dan kedisiplinan para anggotanya. Pimpinan partai biasanya lebih tegas dengan para kadernya dan tidak segan-segan memberhentikan anggota partai yang mnyeleweng dari aturan partai tersebut.

---

<sup>19</sup> Amal, Ichlasul. 2012. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana

### 3. Partai Massa

Partai massa pada awalnya hadir sebagai bentuk respon rakyat untuk memberikan hak pilih kepada hak politik. Partai massa bercirikan mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.

### 4. Partai Diktatorial

Partai Diktatorial adalah partai yang memiliki ideologi yang lebih radikal dan kaku. Pemimpin tertinggi partai biasanya melakukan kontrol yang lebih ketat kepada anggota-anggotanya, rekrutmen yang dilakukan pada partai diktatorial jauh lebih ketat dibandingkan partai lain.

### 5. Partai *Catch-all*

*Partai Catch-all* merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Tujuan dari partai ini adalah mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum sebanyak-banyaknya, langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan penawaran kebijakan baru memberikan keuntungan bagi kadernya.

#### 2.2.6 Pengertian Pemilu

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan salah satu hal yang penting untuk rakyat Indonesia. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap cukup akurat untuk

mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak.

Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilu merupakan wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum<sup>20</sup>.

Pemilu diartikan sebagai instrument untuk mewujudkan kedaulatan bagi masyarakat Indonesia. Pemilu bertujuan untuk membentuk pemimpin yang mampu menampung dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pelaksanaan pemilu haruslah dijalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada.

Dahlan Thaib mengemukakan bahwa: “pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi<sup>21</sup>”

Berdasarkan pendapat tersebut pemilu dapat diartikan sebagai proses pergantian kekuasaan melalui arena kompetisi politik, mekanisme yang digunakan adalah dengan melakukan pemungutan suara, menang atau kalahnya kandidat akan ditentukan oleh masyarakat. Maka dari itu, pada saat menjelang pemilu para kandidat berlomba-lomba untuk mencari perhatian masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi politik.

---

<sup>20</sup> Jurdi Fajlurrahman (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana

<sup>21</sup> Ibid. Hal 3

Menurut A.Sudiharto pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan<sup>22</sup>.

Pemilu merupakan sebagai sarana demokrasi yang penting dan juga menjadi perwujudan yang nyata untuk melihat keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum, maka semakin tinggi kadar demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila tingkat partisipasi rakyat rendah dalam mengikuti pemilu, maka dapat dikatakan pula semakin rendah kadar demokrasi yang terdapat dalam penyelenggaraan pemilu.

Pengertian Pemilu juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa: Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memberikan hak suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan yang ada<sup>23</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada asas-asas tersebut, dan penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip:

---

<sup>22</sup> Ramlam Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- a. Mandiri
- b. Lujur
- c. Adil
- d. Berkepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif, dan
- k. Efisien.

#### 2.2.7 Hak Pilih dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

##### a. Hak pilih aktif (hak memilih)

Hak aktif adalah hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk memilih pemimpinnya.

##### b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Hak pasif adalah hak untuk dipilih untuk menduduki kursi kepemimpinan baik di legislatif maupun di eksekutif. Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah



mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan yang dimaksud sesuai dengan pasal

a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya

b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

